

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR  
332/PID.SUS.LH/2016/PN.PNG TENTANG *ILLEGAL LOGGING*

SKRIPSI

Oleh

Yessy Setiyowati

NIM. C93215091



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2019

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yessy Setiyowati

NIM : C93215091

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan  
Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png Tentang *Illegal  
Logging*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Yessy Setiyowati

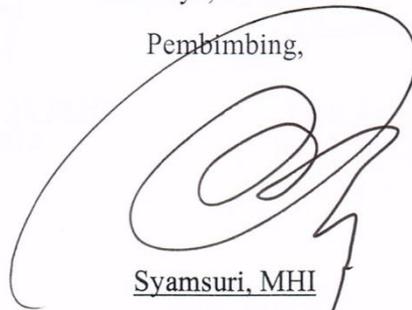
NIM. C93215091

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yessy Setiyowati NIM.C93215091 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Juli 2019

Pembimbing,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a sharp downward stroke at the end.

Syamsuri, MHI

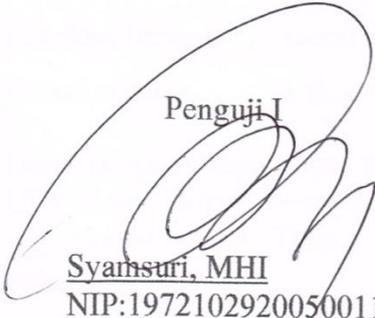
NIP. 197210292005011004

## PENGESAHAN

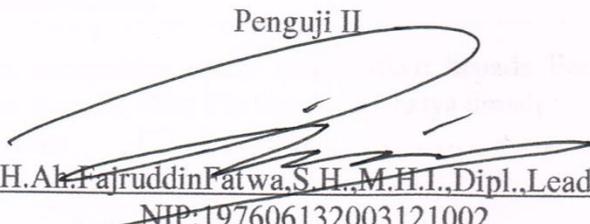
Skripsi yang ditulis oleh Yessy Setiyowati NIM C93215091 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

### Majelis Munaqosah Skripsi

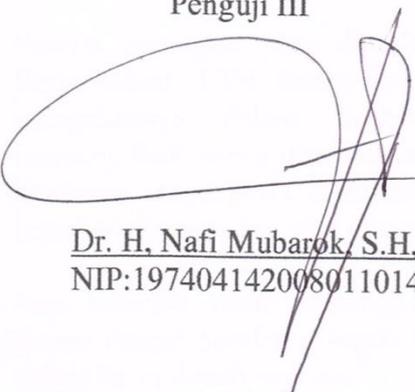
Penguji I

  
Syamsuri, MHI  
NIP:1972102920050011004

Penguji II

  
H. Ak. Fajruddin Patwa, S.H., M.H.I., Dipl., Lead  
NIP:197606132003121002

Penguji III

  
Dr. H. Nafi Mubarak, S.H., M.H.I  
NIP:197404142008011014

Penguji IV

  
Moh. Faizur Rohman, M.H.I  
NIP:198911262019031010

Surabaya, 2 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP:195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yessy Setiyowati  
NIM : C93215091  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail address : [yessysetiyowati101@gmail.com](mailto:yessysetiyowati101@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 332/PID.SUS-LH/2016/PN.PNG TENTANG *ILLEGAL LOGGING*.**

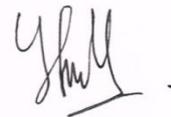
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Oktober 2019

Penulis



(Yessy Setiyowati)

































- b. Pustaka, yaitu teknik mencari data dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang akan diteliti dengan buku-buku atau literatur terkait dengan penelitian yang akan dibahas. Misalnya:

- 1) Alie Yafie, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Bogor: PT Kharisma Ilmu,
- 2) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005,
- 3) Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2011,

#### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian data skripsi ini menggunakan teknik analisa diskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya. Dalam hal ini data tentang sanksi hukum tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN Png kemudian dianalisa menggunakan teori hukum pidana islam dalam hal ini teori hukuman *ta'zīr*. Kemudian pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori *jarīmah ta'zīr* kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus dalam hal ini sanksi pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN Png.

## J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab I, tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini akan mengemukakan tentang teori *ta'zīr* yang meliputi pengertian *jarīmah ta'zīr*, dasar hukum *ta'zīr*, macam-macam *jarīmah ta'zīr*, Unsur-unsur *ta'zīr*.

Bab III, bab ini membahas tentang sanksi pidana putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* didalam direktori putusan Pengadilan Negeri Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png tentang *Illegal Logging* yang meliputi: deskripsi kasus tindak pidana *Illegal Logging*, landasan hukum yang digunakan Hakim dalam menyelesaikan kasus tindak pidana *Illegal Logging*, dan amar putusan Hakim.

Bab IV, bab ini mengemukakan analisa tinjauan hukum pidana islam tentang sanksi tindak pidana *Illegal Logging* dan pandangan hukum pidana Islam terhadap direktori putusan Pengadilan Negeri 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png tentang *Illegal Logging*.











































Terdakwa bambang Wiyono Bin Tukiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016, sekira jam 19.00 WIB terdakwa ditangkap di rumah terdakwa Dukuh Jurugan Rt. 02 Rw. 01 Desa Karang Patihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Terdakwa ditangkap karena menebang dan menyimpan kayu jati dari hutan tanpa dokumen yang sah. Terdakwa ditangkap oleh pihak perhutani dan pihak polsek pulung. Karena pada bulan Januari 2016 terdakwa mengambil kayu jati dari kawasan hutan sebanyak 1 (satu) pohon dan kemudian dipotong menjadi 2 (dua) potong. Kemudian terdakwa mengambil kayu jati tersebut dari kawasan hutan di petak 93i dan petak 94 RPH Centong BKPH Pulung masuk Dukuh Jurugan, Desa Karang Patihan. Bahwa kayu jati tersebut terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa, untuk mengambil kayu tersebut terdakwa menggunakan alat berupa gergaji tangan untuk memotong kayu, prekul dan juga bermata ganco untuk menghilangkan kulit kayu jati dan sabit untuk memotong ranting dan alat-alat tersebut semua milik terdakwa.

**D. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo dalam Kasus Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam Putusan Nomor: 332/Pid.Sus-LH/2016/PN.Png**

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas yang unsur-unsurnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu dakwaan tunggal yang sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (2) Jo

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Kehutanan. Memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Orang Perseorangan”, bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan dalam undang-undang a quo telah jelas disebutkan dalam pasal 1 angka 21 setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan dalam doktrin ilmu pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana di mana perbuatan pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pasal 44 KUHP. Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa yaitu Bambang Wiyono Bin Tukiran dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai, sehat jasmani dan rohani dibuktikan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim serta Terdakwa termasuk orang yang cakap berbuat hukum atau dapat mempertanggung jawabkan perbuatan hukumnya.
2. Unsur “Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”, bahwa dalam elemen unsur ini mensyaratkan adanya “kesengajaan” dimana dalam doktrin ilmu pidana mengenai kesengajaan adalah “dengan sengaja” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*schuld*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti

dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*) atau dalam arti lain “sengaja” adalah kemampuan kesadaran untuk menginsyafi apa yang dilakukan dan akibat-akibat yang mungkin timbul oleh karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya. Bahwa kesengajaan terjadi apabila suatu perbuatan telah timbulnya pelaksanaan dan atau persiapan dari suatu perbuatan tersebut. Bahwa fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, bahwa terdakwa telah memiliki kemampuan kesadaran untuk menginsyafi atau menyadari apa yang dilakukan dan akibat-akibat yang mungkin timbul oleh karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya, selain itu atas perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum telah terungkap adanya pelaksanaan dan telah selesainya perbuatan terdakwa sebagaimana uraian perbuatan terdakwa pada fakta dan keadaan hukum pada pertimbangan putusan *a quo* di atas. Bahwa dalam fakta hukum terungkap. Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira jam 19.00 WIB terdakwa ditangkap di rumah terdakwa Dukuh Jurugan Rt. 02 Rw. 01 Desa Karang Patihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo - Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menebang dan menyimpan kayu jati dari hutan tanpa dokumen yang sah. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak perhutani dan dari pihak Polsek Pulung. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 terdakwa mengambil kayu jati dari kawasan hutan

sebanyak 1 (satu) pohon dan kemudian dipotong menjadi 2 (dua) potong. Bahwa benar terdakwa menebang satu pohon kayu jati pada tahun 2015, dan kemudian pohon tersebut dipotong dan kemudian dibelah-belah sesuai keinginan terdakwa. Bahwa benar terdakwa mengambil kayu jati tersebut dari kawasan hutan di petak 93i dan petak 94 RPH Centong BKPH Pulung masuk Dukuh Jurugan, Desa Karang Patihan. Bahwa benar kayu jati tersebut terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa. Bahwa benar untuk mengambil kayu tersebut terdakwa menggunakan alat berupa gergaji tangan untuk memotong kayu, prekul dan juga bermata ganco untuk menghilangkan kulit kayu jati dan sabit untuk memotong ranting dan alat-alat tersebut semua milik terdakwa. Terdakwa mengambil kayu tersebut dengan cara pohon kayu yang masih berdiri terdakwa potong dengan menggunakan gergaji, setelah pohon kayu jati roboh ranting-ranting pohon kayu jati tersebut oleh terdakwa dipotong dengan menggunakan sabit dan kemudian terdakwa potong pohon kayu jati tersebut menjadi 2 bagian, Kemudian oleh terdakwa kulit kayu jati dihilangkan dengan menggunakan prekul yang juga bermata ganco sampai berbentuk balok dan kemudian terdakwa bawa pulang kayu-kayu jati tersebut dengan cara terdakwa pangkul dan terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa. Jarak rumah terdakwa dengan tempat menebang pohon sekitar 2 kilometer. Rumah terdakwa bersebelahan dengan hutan perhutani, terdakwa tinggal di kawasan sekitar hutan. Kemudian terdakwa menggarap tanah milik

perhutani untuk ditanami dan terdakwa terdaftar untuk bercocok tanam di tanah milik Perhutani. Terdakwa tidak ada ijin menebang dan mengambil pohon jati milik terdakwa meminta tolong saksi Sobri untuk menggergaji kayu jati yang terdakwa ambil dari hutan menjadi berbagai bentuk dan ukuran kayu jati terdakwa ambil sudah berbentuk papan, balok dan reng dengan berbagai ukuran. Bahwa apabila dikaitkan pengertian dan fakta hukum tersebut diatas telah ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan dan pula terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang ketika menebang pohon jati dari kawasan hutan sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti.

3. Unsur “Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan”, terdakwa mengambil kayu tersebut dengan cara pohon kayu yang masih berdiri terdakwa potong dengan menggunakan gergaji, setelah pohon kayu jati roboh ranting-ranting pohon kayu jati tersebut oleh terdakwa dipotong dengan menggunakan sabit dan kemudian terdakwa potong pohon kayu jati tersebut menjadi 2 bagian, kemudian oleh terdakwa kulit kayu jati dihilangkan dengan menggunakan prekul yang juga bermata ganco sampai berbentuk balok dan kemudian terdakwa bawa pulang kayu-kayu jati tersebut dengan cara terdakwa pangkul dan terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa. Jarak rumah terdakwa dengan tempat menebang pohon sekitar 2 kilometer, rumah terdakwa bersebelahan dengan hutan









alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Terdakwa mampu bertanggung jawab maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

3. Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum telah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kehutanan. Karena sesuai dengan pemeriksaan sidang maka dipertimbangkan unsur sebagai berikut:

a. Unsur “Orang Perseorangan”, bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan dalam undang-undang a quo telah jelas disebutkan dalam pasal 1 angka 21 setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan dalam doktrin ilmu pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana di mana perbuatan pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pasal 44 KUHP. Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa yaitu Bambang Wiyono Bin Tukiran dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai, sehat jasmani dan rohani dibuktikan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim serta Terdakwa termasuk orang yang cakap berbuat hukum atau dapat mempertanggung jawabkan perbuatan hukumnya.

b. Unsur “Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”, bahwa dalam elemen unsur ini mensyaratkan adanya “kesengajaan” dimana dalam doktrin ilmu pidana mengenai kesengajaan adalah “dengan sengaja” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*schuld*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*) atau dalam arti lain “sengaja” adalah kemampuan kesadaran untuk menginsyafi apa yang dilakukan dan akibat-akibat yang mungkin timbul oleh karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya. Bahwa kesengajaan terjadi apabila suatu perbuatan telah timbulnya pelaksanaan dan atau persiapan dari suatu perbuatan tersebut. Fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, bahwa terdakwa telah memiliki kemampuan kesadaran untuk menginsyafi atau menyadari apa yang dilakukan dan akibat-akibat yang mungkin timbul oleh karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya, selain itu atas perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum telah terungkap adanya pelaksanaan dan telah selesainya perbuatan terdakwa sebagaimana uraian perbuatan terdakwa pada fakta dan keadaan hukum pada pertimbangan putusan *a quo* di atas. Bahwa dalam fakta hukum terungkap benar Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira jam 19.00 WIB terdakwa ditangkap di

rumah terdakwa Dukuh Jurugan Rt. 02 Rw. 01 Desa Karang Patihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menebang dan menyimpan kayu jati dari hutan tanpa dokumen yang sah. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak perhutani dan dari pihak Polsek Pulung. Namun pada bulan Januari 2016 terdakwa mengambil kayu jati dari kawasan hutan sebanyak 1 (satu) pohon dan kemudian dipotong menjadi 2 (dua) potong. Bahwa benar terdakwa menebang satu pohon kayu jati pada tahun 2015, dan kemudian pohon tersebut dipotong dan kemudian dibelah-belah sesuai keinginan terdakwa. Bahwa benar terdakwa mengambil kayu jati tersebut dari kawasan hutan di petak 93i dan petak 94 RPH Centong BKPH Pulung masuk Dukuh Jurugan, Desa Karang Patihan. Bahwa benar kayu jati tersebut terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa. Untuk mengambil kayu tersebut terdakwa menggunakan alat berupa gergaji tangan untuk memotong kayu, prekul dan juga bermata ganco untuk menghilangkan kulit kayu jati dan sabit untuk memotong ranting dan alat-alat tersebut semua milik terdakwa. Terdakwa mengambil kayu tersebut dengan cara pohon kayu yang masih berdiri terdakwa potong dengan menggunakan gergaji, setelah pohon kayu jati roboh ranting-ranting pohon kayu jati tersebut oleh terdakwa dipotong dengan menggunakan sabit dan kemudian terdakwa potong pohon kayu jati tersebut menjadi 2 bagian, Kemudian oleh terdakwa kulit kayu jati dihilangkan dengan menggunakan prekul yang juga bermata ganco

sampai berbentuk balok dan kemudian terdakwa bawa pulang kayu-kayu jati tersebut dengan cara terdakwa pangkul dan terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa. Jarak rumah terdakwa dengan tempat menebang pohon sekitar 2 kilometer. Rumah terdakwa bersebelahan dengan hutan perhutani, terdakwa tinggal di kawasan sekitar hutan. Kemudian terdakwa menggarap tanah milik perhutani untuk ditanami dan terdakwa terdaftar untuk bercocok tanam di tanah milik Perhutani. Terdakwa tidak ada ijin menebang dan mengambil pohon jati milik terdakwa meminta tolong saksi Sobri untuk menggergaji kayu jati yang terdakwa ambil dari hutan menjadi berbagai bentuk dan ukuran kayu jati terdakwa ambil sudah berbentuk papan, balok dan reng dengan berbagai ukuran. Bahwa apabila dikaitkan pengertian dan fakta hukum tersebut diatas ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan dan pula terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang ketika menebang pohon jati dari kawasan hutan sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti.

- c. Unsur “Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan”, terdakwa mengambil kayu tersebut dengan cara pohon kayu yang masih berdiri terdakwa potong dengan menggunakan gergaji, setelah pohon kayu jati roboh ranting-ranting pohon kayu jati tersebut oleh terdakwa dipotong dengan menggunakan sabit dan kemudian terdakwa potong pohon kayu jati







kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya.

Sanksi *ta'zīr* yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zīr* ditentukan kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatannya.

Dalam kaidah fikih yang berbunyi “Berat ringannya sanksi *ta'zīr* diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan. Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman.

Sebagaimana *jarīmah* yang dilakukan terdakwa, penulis berpendapat hukuman yang tepat diberikan kepada terdakwa adalah *ta'zīr*, karena *illegal logging* tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an dan hadis. Hukuman *ta'zīr* yang diberikan bisa berupa penjara dan denda. Karena bagaimanapun Islam menghendaki pelaku *Jarīmah* untuk taubat. Namun kembali lagi pada penjelasan *ta'zīr* yang telah menjadi kewenangan ulil amri menjatuhkan hukuman.

Oleh karena itu sanksi yang diterapkan oleh hakim dalam hukum pidana islam berupa hukuman kawalan (penjara kurungan). Hukuman penjara ini dapat dilakukan dirumah, penjara, atau tempat-tempat lain. Pada intinya, hukuman *ta'zīr* pelaku tindak pidana yang dengan sengaja melakukan

penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tanpa memiliki izin ini diserahkan kepada majelis hakim agar memberi sanksi sesuai dan memperhatikan kemaslahatan umum berdasarkan kaidah hukum pidana islam.

Ditinjau dari hukum pidana Islam, penjatuhan hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 4 bulan dan 10 hari. Dijerat pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang berbunyi: Pasal 82 ayat (1) huruf b

Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 82 ayat (2) yang berbunyi:

Yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan. Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Mengingat tindakan seperti ini akan terus terjadi dan menjadi kebiasaan apabila aparat penegak hukum yang terkait tidak bertindak secara maksimal dalam menerapkan hukuman. Maka perlu ketegasan Hakim dalam menjatuhkan hukuman agar memberikan efek jera kepada pelaku dan membuat mereka untuk berpikir dua kali sebelum mengulangi perbuatannya lagi.

Menurut penulis hukuman yang harus ditetapkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan pidana islam, yaitu berupa *ta'zīr* yang pada masalah ini adalah berkaitan dengan kemerdekaan berupa penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.

Dalam perkara ini hukuman *ta'zīr* yang pantas diterima oleh Bambang Wiyono bin Tukiran adalah hukuman *ta'zīr* berupa penjara kurungan. Hukuman ini termasuk sebagai kekuasaan ulil amri demi untuk kemaslahatan rakyatnya.

Maka dari itu hukuman *ta'zīr* berupa penjara kurungan pada tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh terdakwa Bambang Wiyono bin Tukiran pada putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 332/Pid.Sus-LH/2016/PN.Png dianggap sesuai jika harus diterapkan dalam konteks hukum pidana islam.







